

Partisipasi Masyarakat terhadap Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang

Community Participation in Handling Slum Settlements in Ketupat Village Samarinda Seberang District

Yaskinul Anwar^{1*}, Iya' Setyasih & Herlan

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, Indonesia

Diterima: 07 Mei 2021; Direview: 08 Mei 2021; Dipublish: 13 Juli 2021

*Corresponding Email: yaskinul.anwar@fkip.unmul.ac.id

Abstrak

Kampung Ketupat merupakan permukiman kumuh yang berada dibantaran Sungai Mahakam. Dengan adanya permukiman kumuh di Kampung Ketupat maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuisisioner responden. Kondisi permukiman kumuh di Kampung Ketupat masih dalam kondisi kumuh karena penanganan oleh pemerintah belum sepenuhnya ditangani. Penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah baru perbaikan akses jalan dan pengecatan dibagian depan rumah sedangkan rumah yang berada ditubuh sungai belum ditangani. Tingkat partisipasi terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan hasil skor kuisisioner dapat dilihat untuk tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil termasuk dalam kategori sangat tinggi sedangkan tahap evaluasi dan monitoring masuk kategori kategori tinggi. Dari empat tahapan tersebut jika dilihat reratanya masuk dalam kategori sangat tinggi. Partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh masuk dalam kategori sangat tinggi yang mana masyarakat ikut berperan mulai tahap perencanaan sampai pemanfaatan

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Penanganan, Permukiman Kumuh.

Abstract

Kampung Ketupat is a slum settlement located along the Mahakam River. With the existence of slum settlements in Ketupat Village, this study aims to determine the level of community participation in the handling of slum settlements in Ketupat Village. This research is qualitative research with a descriptive approach. The data used in this study are the results of the respondent's questionnaire. The condition of the slum settlement in Ketupat Village is still in a slum condition because the handling by the government has not been fully handled. The measures that have been carried out by the government have only been repairing road access and painting on the front of the house, while the house in the body of the river has not been handled. The level of participation in the handling of slum settlements in Ketupat Village, Samarinda Seberang Subdistrict, based on the results of the questionnaire scores, can be seen that the planning, implementation, and utilization stages of the results are in the very high category while the evaluation and monitoring stages are in the high category. Of the four stages, if seen, the average falls into the very high category. Community participation in the handling of slum settlements falls into the very high category where the community plays a role from the planning stage to the utilization stage.

Keywords: Participation, Community, Handling, Slum Settlements.

How to Cite: Anwar, Y. Setyasih, I. & Herlan. (2021). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 584-591.



PENDAHULUAN

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Pada dasarnya kemunculan kawasan permukiman kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat pelayanan fasilitas kota yang tinggi, banyaknya lowongan pekerjaan dan kemudahan jangkauan (Nursyahbani & Bitta, 2015).

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di Negara berkembang lainnya (Kementerian Pekerjaan Umum, 2020). Pengkajian tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisik, kedua kondisi sosial, dan ketiga dampak yang disebabkan oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tampak dari kondisi bangunan yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, serta sampah belum dikelola dengan baik (Putro, 2011).

Seiring dengan meningkatnya permukiman kumuh di wilayah perkotaan maka pemerintah mengeluarkan program penanganan permukiman kumuh, yaitu program yang telah ditetapkan oleh kementerian perumahan pada tahun 2010 yang merupakan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK). Program PLP2K-BK dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, melalui perencanaan dan penanganan serta menyinergikan tindakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guna mensukseskan program ini, salah satunya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan mereka tinggal, baik dari aspek masukan, aspek proses dan aspek keluaran (Hadiyanti, 2008) (Dwiyanto & Jemadi, 2013). Partisipasi masyarakat ini diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanganan permukiman kumuh. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki permasalahan permukiman kumuh hampir disetiap kota.

Data Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa di Indonesia tercatat 38.431 hektar luas kawasan kumuh (Pitoko, 2016). Data ini menyebutkan bahwa peningkatan permukiman kumuh tersebar di Indonesia seluruh Indonesia salah satunya di Kota Samarinda. Salah satu kawasan kumuh di Kota Samarinda berada di Kampung Ketupat.

Kampung Ketupat merupakan salah satu kampung yang berada dikawasan dalam Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang yang berada di jalan Mangkupalas. Kampung ini memiliki penduduk yang rata-rata bekerja sebagai pengrajin ketupat, sehingga kini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Ketupat. Selain itu kampung ini lokasinya tidak hanya kumuh saja tetapi berada pada tubuh dan bantaran sungai Mahakam.

Kampung Ketupat yang dulunya permukiman kumuh kini telah ditangani melalui program Kotaku. Pemerintah telah memprogramkan untuk penanganan kawasan kumuh di Kampung Ketupat, namun dalam hal ini masih banyak rumah yang belum tertata atau masih kumuh sehingga dalam penanganan permukiman kumuh perlunya keikutsertaan masyarakat untuk menjaga dan terus meningkatkan inisiatif masyarakat dalam penanganan terhadap permukiman kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal (Conyers, 1991). Selain itu masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut (Conyers, 1991).

Model partisipasi masyarakat ini dibagi menjadi empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring serta pemanfaatan hasil (Kalesaran et al., 2015). Semakin



tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal (Sigalingging & Warjio, 2014). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat.

Kampung ini merupakan salah satu kampung tua di Kota Samarinda, yang corak pengembangannya masih mengarah ke arah sungai Mahakam. Selain itu kampung ini juga telah ditetapkan sebagai desa wisata ketupat yang mana menghadirkan corak dan nilai estetika yang berbeda dengan mengusung kelestarian lingkungan sekaligus pengembangan ekonomi kreatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni digunakan untuk melakukan kajian partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan individu masyarakat serta aparat pemerintah di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball sampling* dimana sampel yang diambil adalah responden yang ahli atau expert dalam penanganan permukiman kumuh Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang. Sampel yang akan dipilih yaitu Aparat Desa, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner terkait dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pemanfaatan hasil penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat dengan sistem skoring 1 – 5. Hasil kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa tahap berikut: 1) Mentabulasi jawaban responden; 2) Menghitung batas nilai awal dan nilai akhir dengan mencari indeks minimal, indeks maksimal serta interval dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Indeks Minimal} &= Bt \times P \times n \\ \text{Indeks Maksimal} &= Bb \times P \times n \\ \text{Interval} &= \frac{\text{Skor gabungan}}{\text{Indeks Maksimal}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

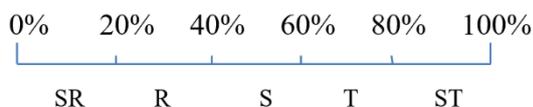
Bb = Skor tertinggi

Bt = Skor terendah

P = Variabel yang diteliti

n = Jumlah responden

Membuat skala likert sebagai berikut:



Sumber: Riduwan (2013)

Keterangan

SR : Sangat Rendah

R : Rendah

S : Sedang

T : Tinggi

ST : Sangat Tinggi

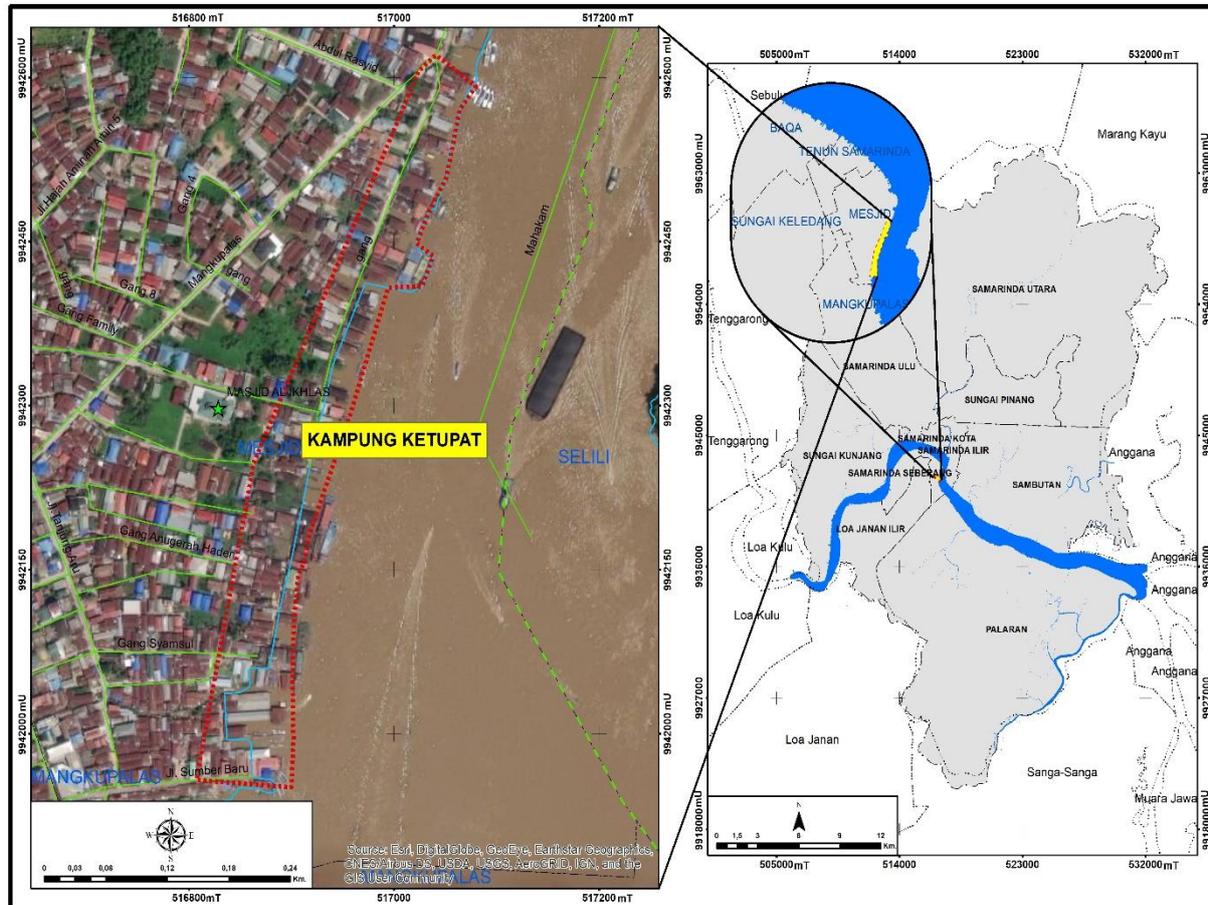
HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Ketupat yang berada di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 5



hektar dengan letak antara $0^{\circ}31'78''$ LS – $0^{\circ}31'30.39''$ LS dan $117^{\circ}9'11.80''$ BT– $117^{\circ}9'6.41''$ BT. Wilayah Kampung Ketupat berada di RT 14, 15, 20, 21, 02 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang. Untuk melihat gambar lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Kampung Ketupat

Permukiman kumuh di Kampung Ketupat telah mendapatkan perhatian pemerintah kota dan pusat melalui program Kotaku. Selain itu pemerintah Kota Samarinda dan masyarakat telah sepakat berkeinginan menjadikan Kampung Ketupat sebagai destinasi wisata di Kota Samarinda. Permukiman kumuh di Kampung Ketupat ini terdiri dari 49 rumah yang berada dibantaran sungai dan 44 rumah yang berada ditubuh sungai. Permukiman yang masuk dalam tubuh sungai akan direncanakan pembongkaran kemudian dipindahkan dan digabung dengan rumah yang berada dibantaran sungai yang sesuai dengan perencanaan pemerintah untuk menjadikan Kampung Ketupat sebagai kampung deret secara bertahap.

Penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat dimulai pada tahun 2015 dengan ditetapkannya kawasan ini menjadi wilayah penanganan permukiman Kumuh di Kota Samarinda dari delapan lokasi yang telah ditetapkan untuk ditangani dari program Kotaku. Kemudian pada tahun 2017 pemerintah mulai melaksanakan penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat yaitu perbaikan aksesibilitas. Akses jalan yang telah ditangani memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan memberikan kemudahan untuk akses roda empat dimana dulunya bahwa akses jalan di Kampung Ketupat merupakan jembatan kayu yang lebarnya hanya 1,5 meter, sedangkan akses jalan yang sudah ditangani yaitu memiliki lebar 2,5 meter. Selain penanganan akses jalan pemerintah juga memberikan fasilitas berupa bak sampah dan gerobak sampah sehingga memudahkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara rutin yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang berada di Kampung Ketupat.

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh

Partisipasi masyarakat merupakan suatu upaya dalam pengembangan masyarakat yang sangat dibutuhkan dan memberikan pengaruh pada keberhasilan penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat. Hal ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk turut memberikan pendapat dan

kontribusinya dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ketupat

No	Tahap Partisipasi	Tingkat Partisipasi	Interval	Skor %
1.	Perencanaan	Sangat Rendah	1-30	-
		Rendah	31-60	-
		Sedang	61-90	-
		Tinggi	91-120	-
		Sangat Tinggi	121-150	135
				$(135/150) \times 100\% = 90\%$
2.	Pelaksanaan	Sangat Rendah	1-40	-
		Rendah	41-80	-
		Sedang	81-120	-
		Tinggi	120-160	-
		Sangat Tinggi	161-200	161
				$(161/200) \times 100\% = 80.5\%$
3.	Evaluasi dan Monitoring	Sangat Rendah	1-50	-
		Rendah	51-100	-
		Sedang	101-150	-
		Tinggi	151-200	162
		Sangat Tinggi	201-250	-
				$(162/250) \times 100\% = 64.8\%$
4.	Pemanfaatan Hasil	Sangat Rendah	1-20	-
		Rendah	21-40	-
		Sedang	41-60	-
		Tinggi	61-80	-
		Sangat Tinggi	81-100	88
				$(88/100) \times 100\% = 88\%$

Berdasarkan tabel 1, tingkat partisipasi masyarakat hasil skor kuisisioner tahap perencanaan 90% dengan kategori sangat tinggi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Kampung Ketupat yaitu partisipasi non fisik seperti masyarakat ikut dilibatkan dalam memutuskan penanganan yang dilaksanakan, dan masyarakat ikut rapat dalam perencanaan penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan dengan merencanakan pembangunan dapat dilihat dari keaktifan masyarakat untuk ikut terlihat secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan kontribusi seperti pendapat, kritik, dan saran (Sanjaya, 2013).

Sedangkan pada tahap pelaksanaan tingkat partisipasi 80,5% atau kategori sangat tinggi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini yaitu masyarakat ikut memberi sumbangan pemikiran, maupun ikut gotong royong pada saat pembangunan dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh. Selain itu masyarakat juga memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam penanganan permukiman kumuh.

Pada tahap evaluasi dan monitoring tingkat partisipasi masyarakat adalah 64.8% atau dalam kategori tinggi. partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi dan monitoring yaitu masyarakat ikut memonitor kesesuaian perencanaan/pelaksanaan, masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana dalam perencanaan penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat. Tingkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan dalam pembangunan (Ikbal & Jabbar, 2019).



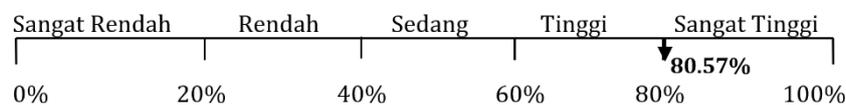
Kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil adalah 88% dengan kategori sangat tinggi. Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil yaitu masyarakat menilai penting keberadaan hasil dari penanganan seperti menjaga atau memelihara kebersihan lingkungan serta menjaga fasilitas yang telah disediakan. Dampak positif jika masyarakat telah merasakan hasil dari pembangunan, maka masyarakat akan lebih dapat memutuskan keputusan yang benar, mengambil nilai-nilai martabat manusia (*human dignity*) dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama, lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab, dan memperbaiki semangat bekerja sama, menimbulkan kesatuan kerja, serta mengikuti perubahan-perubahan yang lebih memungkinkan (Tangkumahat et al., 2017).

Dari empat tahap tersebut untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat maka dianalisis menggunakan skor gabungan. Partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat dilihat dari skor gabungan hasil analisis keempat tahap partisipasi untuk menyatakan kategori tingkat partisipasi masyarakat di Kampung Ketupat yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Skor Gabungan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ketupat

Interval skor	Tingkat partisipasi	Skor gabungan
1-140	Sangat rendah	-
141-280	Rendah	-
281-420	Sedang	-
421-560	Tinggi	-
561-700	Sangat tinggi	564
		$(564/700) \times 100\% = 80.57\%$

Skala Likert



Hasil yang diperoleh dari skor gabungan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 564 yang dimana jika berdasarkan analisis skala likert angka tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu 80,57%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kampung Ketupat sangat tinggi dari tahap pelaksanaan sampai pemanfaatan hasil. Keikutsertaan masyarakat merupakan kunci dalam pembangunan sistem *bottom up* yang dalam hal ini adalah penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan hanya timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi (Yusuf, 2019). Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya penanganan permukiman kumuh itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalam penanganan masalah permukiman kumuh dilingkungannya.

Dilihat dari jenis kelamin dari responden yang dalam penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat, diketahui bahwa tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda (50% responden perempuan dan 50% responden laki-laki). Sedangkan pada tahap pelaksanaan tingkat berpartisipasi laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada tahap evaluasi dan monitoring peran laki-laki masih mendominasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat. Sedangkan pada tahap pemanfaatan tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan seimbang. Hal ini dikarena dalam pembangunan laki-laki masih dominan

dalam aktifitas fisik (Irma & Hasanah, 2018). Sedangkan peran perempuan lebih cenderung pada aktifitas yang tidak memerlukan fisik yang ekstra.

Selain gender karakteristik usia merupakan faktor untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dimana dengan usia yang berbeda akan menghasilkan partisipasi yang berbeda pula. Partisipasi masyarakat di Kampung Ketupat berdasarkan karakteristik usia ditemukan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil didominasi oleh usia 41 – 60 tahun. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan golongan usia menengah kebawah lebih cenderung kurang berpartisipasi karena lebih mementingkan pekerjaannya diluar kampung, dan rerata memiliki waktu terbatas untuk ikut berpartisipasi. Rendahnya partisipasi kelompok usia menengah kebawah juga diduga karena masih ada rasa sungkan terhadap para orang tua yang dianggap senior (Suroso et al., 2014). Kondisi inilah yang membuat partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat lebih cenderung didominasi kelompok umur menengah keatas.

Kesadaran/kemauan merupakan faktor utama dari masyarakat dalam berpartisipasi. Responden yang berpartisipasi dalam hal kesadaran pribadi yakni sekitar 40%, yang berpartisipasi ikut-ikutan 20%, pengaruh orang lain 10%, dan faktor pendorong dari pemerintah desa/setempat yakni 30%. Dalam hal ini salah satu faktor pendorong jalannya partisipasi masyarakat yang banyak hal yang mempengaruhi, faktor yang paling mendorong yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan permukiman kumuh dimana masyarakat sangat menginginkan kesejahteraan mereka dalam hal pembangunan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan partisipasi dalam masyarakat adalah pendidikan. Distribusi pendidikan responden terdiri dari 10% berpendidikan SD, 10% berpendidikan SMP, 60% berpendidikan SMA dan 20% berpendidikan Diploma/Sarjana. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, maka menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih mempunyai perhatian yang besar terhadap keadaan lingkungannya maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di suatu desa. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh. Hal ini sejalan hasil penelitian Putra (2018), dimana pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan tempat tinggal mereka.

Pekerjaan masyarakat merupakan faktor pendorong untuk berpartisipasi dikarenakan pekerjaan yang tidak sama juga memiliki tingkat kesibukannya (waktu/kerja) berbeda-beda pula (Suroso et al., 2014). Dari pekerjaan masyarakat yang beragam membuat tingkat penghasilan yang beragam pula. Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner responden paling banyak berpenghasilan Rp. 1.000.000, – 2.000.000,/bulan. Sedangkan jika dilihat tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat penghasilan menunjukkan partisipasi masyarakat pada perencanaan masyarakat berpenghasilan > 2 juta lebih banyak berpartisipasi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, evaluasi dan monitoring serta pemanfaatan tingkat partisipasi masyarakat dengan penghasilan 1 – 2 juta paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan ekonomi 1- 2 juta lebih berperan aktif dalam penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat tergolong sangat tinggi, terutama pada partisipasi pada saat perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil. Sedangkan partisipasi masyarakat pada tahap monitoring dan evaluasi termasuk dalam kategori tinggi saja. Perbedaan partisipasi masyarakat di Kampung Ketupat disebabkan karena faktor gender, kesadaran, pendidikan dan juga penghasilan. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat baik sekarang dan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA



- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. UGM Press.
- Dwiyanto, B. S., & Jemadi, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.87>
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(IX), 90-99. <https://doi.org/10.21009/pip.171.10>
- Ikbal, M., & Jabbar, A. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Wedana*, 5(1), 581-588.
- Irma, A., & Hasanah, D. (2018). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Sosial Work*, 7(1), 71-80.
- Kalesaran, F., Rantung, V. V., & Pioh, N. R. (2015). Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. *Acta Diurna*, 4(5), 1-13.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2020). *Kotaku: Kota Tanpa Kumuh*. <http://Kotaku.Pu.Go.Id/>. <http://kotaku.pu.go.id/view/8543/kumuh-tanggung-jawab-siapa>
- Nursyahbani, R., & Bitta, P. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Jurnal Teknik PWK*, 4(2), 267-281.
- Pitoko, R. A. (2016). *Catat, Kawasan Kumuh Indonesia Lebih dari 38.000 Hektar*. Kompas.Com. <https://properti.kompas.com/read/2016/10/03/201515721/catat.kawasan.kumuh.indonesia.lebih.dari.38.000.hektar>.
- UU RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 1 (2011). <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf>
- Putra, A. P. (2018). Pengaruh tingkat pendidikan dan persepsi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata air terjun selendang arum, Songgon-Banyuwangi. *Jumpa*, 5(1), 172-192.
- Putro, J. D. (2011). Penataan kawasan kumuh pinggiran sungai di kecamatan sungai raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1), 19-34.
- Riduwan. (2013). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta.
- Sanjaya, R. T. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara. *Katalogis*, 1(7), 123-134.
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 116-145.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana*, 17(1), 7-15.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi*, 13(2), 335-342.
- Yusuf, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1849-1860.

